

PEMERINTAH KABUPATEN PASER



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENJA PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025

Jl. R.M. Noto Sunardi, Tanah Grogot. 76251
Telp: 0543-27681

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “**Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025**” yang akan memuat indikator kinerja kegiatan (Input), Keluaran (Output) dan hasil (Outcome). Pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Merencanakan 2 Program yang dijabarkan pada 9 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan total Anggaran Murni Rp 32.296.144.785,-

Akhir kata semoga Renja Perubahan Tahun 2024 yang sederhana ini dapat menjadi manfaat khususnya Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser pada umumnya.

Tana Paser, 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser

H. Muhammad Guntur, S.Sos, MM
Nip. 19670717 198602 1 001

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....	9
2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser	18
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	23
3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025	24
3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025	30
BAB IV PENUTUP	37
4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	37
4.2. Rencana tindak lanjut.....	37

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Kabupaten Paser.....	10
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser s/d Triwulan II Tahun 2025	20
Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	23
Tabel 3. 2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.....	26
Tabel 3. 3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Paser th 2025	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokokbahasa dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Kabupaten Paser

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang ggu ng Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100	12.457.235.579	93	17.507.381.285	90	26.589.493.803	15	4.547.515.654	26	6.883.435.576					41	11.430.951.230	134	28.938.332.515	134	232	Satuan Polisi Pamong Praja
		Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	37.801.325	90	251.475.859	90	141.759.980	25	34.016.578	25	26.081.260					50	60.097.838	140	311.573.697	140	824	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	95	19.668.446	8 Dok	160.570.886	8	56.059.980	2	9.879.378	1	-					3	9.879.378	#VALUE!	170.450.264	#VALUE!	867	Satuan Polisi Pamong Praja
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	95	18.132.879	12 Lap	90.904.973	12	85.700.000	3	24.137.200	4	26.081.260					7	50.218.460	#VALUE!	141.123.433	#VALUE!	778	Satuan Polisi Pamong Praja
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	95	11.664.329.280	90	13.205.619.627	90	19.136.076.006	14	3.087.323.129	22	4.739.221.856					36	7.826.544.985	126	21.032.164.612	133	180	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	11.554.219.718	85 Org/ Bln	13.050.741.523	85	19.053.044.977	85	3.056.039.568	85	4.728.914.504					170	7.784.954.072	#VALUE!	20.835.695.595	#VALUE!	180	Satuan Polisi Pamong Praja

		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 2	110.109.562	24 Lap	154.878.104	12	83.031.029	3	31.283.561	3	10.307.352				6	41.590.913	#VAL UE!	196.469.017	#VAL UE!	178	Satuan Polisi Pamong Praja
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	-	418.203.049	50	6.001.200	86	26.294.904	-	-	-	-				-	-	50	6.001.200	#DIV /0!	1	Satuan Polisi Pamong Praja
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	26.420.524	5	1.140.000	10	23.800.000	-	-	-	-				-	-	5	1.140.000	#DIV /0!	4	Satuan Polisi Pamong Praja
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Undangan	-	25.757.525	5	4.861.200	10	2.494.904	-	-	-	-				-	-	5	4.861.200	#DIV /0!	19	Satuan Polisi Pamong Praja
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	9 5	175.991.061	65	3.683.189.451	80	6.707.174.846	1 4	1.123.898.884	2 1	2.095.569.930				3 5	3.219.468.814	100	6.902.658.265	105	3.922	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	2	20.606.020	47	3.192.881.600	5	3.092.842.800	-	-	2	1.232.744.250				2	1.232.744.250	49	4.425.625.850	2.450	21.477	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5	1.030.291	20	6.798.800	5	12.779.124	-	-	5	12.751.300				5	12.751.300	25	19.550.100	500	1.898	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	4 0	70.801.460	50	53.994.100	42	3.387.977.922	1 0	1.048.140.000	8	795.287.500				1 8	1.843.427.500	68	1.897.421.600	170	2.680	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	1 2	7.727.258	12	4.540.000	12	7.500.000	-	-	-	-				-	-	12	4.540.000	100	59	Satuan Polisi Pamong Praja

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 2	3.704.96 2	12	2.370.00 0	12	5.050.00 0	3	560.000	3	560.000					6	1.120.00 0	18	3.490.00 0	150	94	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	72.121.0 70	12	422.604. 951	20	201.025. 000	4	75.198.8 84	3	54.226.8 80					7	129.425. 764	19	552.030. 715	475	765	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan atas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 2	81.577.9 97	48 Lap	110.434. 296	48	197.618. 617	6	23.730.4 13	3	22.562.5 30					9	46.292.9 43	#VAL UE!	156.727. 239	#VAL UE!	192	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Benda/Jasa Surat Menyurat	1 2	1.854.54 2	12 Lap	995.600	12	1.000.00 0	-	-	-	-					-	-	#VAL UE!	995.600	#VAL UE!	54	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 6	79.723.4 55	36 Lap	109.438. 696	36	196.618. 617	9	23.730.4 13	9	22.562.5 30					1 8	46.292.9 43	#VAL UE!	155.731. 639	#VAL UE!	195	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)	9 5	79.332.8 68	80	250.660. 852	80	380.569. 450	5 8	278.546. 650	-	-					5 8	278.546. 650	138	529.207. 502	145	667	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	72.120.7 82	10 Unit	242.580. 852	10	365.869. 360	3	278.546. 650	-	-					3	278.546. 650	#VAL UE!	521.127. 502	#VAL UE!	723	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2	7.212.08 6	4 Unit	8.080.00 0	6	14.700.0 90	-	-	-	-					-	-	#VAL UE!	8.080.00 0	#VAL UE!	112	Satuan Polisi Pamong Praja

2	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	70	2.919.463.944	75	13.224.856.601	100	5.706.650.982	24	1.356.169.736	29	518.346.409					53	1.874.516.145	128	15.099.372.746	183	517	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100	340.659.461	81	9.975.001.870	100	2.673.356.468	35	482.697.236	15	372.747.909					50	855.445.145	131	10.830.447.015	131	3.179	Satuan Polisi Pamong Praja
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10	17.753.193	30	139.342.000	20	32.992.500	2	8.500.000	-	-					2	8.500.000	31	147.842.000	310	833	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	66	113.820.106	28	111.916.000	100	472.740.500	20	122.451.996	12	77.472.000					32	199.923.996	60	311.839.996	91	274	Satuan Polisi Pamong Praja
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	23	36.661.433	13	51.760.000	806	1.319.449.500	200	330.089.240	20	57.224.581					220	387.313.821	233	439.073.821	1.013	1.198	Satuan Polisi Pamong Praja

		Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																					
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 2	46.745.9 29	235	7.935.39 2.800	20	107.000. 000	5	11.390.0 00	1 2	56.700.0 00				1 7	68.090.0 00	252	8.003.48 2.800	2.10 0	17. 121	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	6	5.000.00 0	1.61 5	1.478.25 1.070	2	4.000.00 0	-	-	-	-				-	-	1.61 5	1.478.25 1.070	26.9 17	29. 565	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	8 7	73.204.8 67	20	193.320. 000	30	50.000.0 00	2	5.506.00 0	4	8.520.00 0				6	14.026.0 00	26	207.346. 000	30	283	Satuan Polisi Pamong Praja

		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	39	73.832.821	15	59.550.000	25	96.000.000	-	-	2	9.010.000				2	9.010.000	17	68.560.000	44	93	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6	5.000.000	1	3.600.000	10	491.333.551	1	4.760.000	2	161.871.328				3	166.631.328	4	170.231.328	67	3.405	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	13	15.302.546	2	1.870.000	13	99.840.417	-	-	1	1.950.000				1	1.950.000	3	3.820.000	23	25	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi PERDA dan Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	100	2.549.522.482	88	3.180.810.723	100	2.983.770.000	29	856.282.000	3	137.595.000				32	993.877.000	120	4.174.687.723	120	164	Satuan Polisi Pamong Praja
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	5	22.220.000	9	65.330.800	5	12.500.000	-	-	2	6.800.000				2	6.800.000	11	72.130.800	220	325	Satuan Polisi Pamong Praja

		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	30	142.553.189	36	2.837.558.800	40	137.450.000	5	16.362.000	5	24.995.000					10	41.357.000	46	2.878.915.800	153	2.020	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	48	2.384.749.293	30	277.921.123	24	2.833.820.000	8	839.920.000	1	105.800.000					9	945.720.000	39	1.223.641.123	81	51	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah PPNS Terhadap Kasus Yang Ditangani	0	29.282.000	0,42	69.044.008	0,42	49.524.514	-	17.190.500	-	8.003.500					-	25.194.000	0	94.238.008	100	322	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3	21.210.000	4	69.044.008	10	49.524.514	1	17.190.500	1	8.003.500					2	25.194.000	6	94.238.008	200	444	Satuan Polisi Pamong Praja
Rata-rata capaian kinerja (%)										39	5.903.685.390	55	7.401.781.985					94	13.305.467.375					
Predikat Kinerja										39		55						94						

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2025 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan I adalah 55%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.564.818.606,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribuan Enam Ratus Enam rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 21.008.289.022,- (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribuan Dua Puluh Dua rupiah) atau sebesar 50,29%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 45% dengan predikat kinerja Sedang.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target ($>100\%$) = 10 indikator, capaian kinerja $>70\%-100\%$ = 5 indikator, capaian kinerja $>50\%-70\%$ = 1 indikator capaian kinerja $0\%-50\%$ = 1 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- 1 Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Satuan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
- 2 pengoordinasian penyusunan rencana kerja Satuan berdasarkan rencana strategis Satuan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
- 3 pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Satuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4 pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Satuan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Satuan;
- 5 penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan

- di lingkungan Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 6** perumusan kebijakan di Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
 - 7** pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
 - 8** pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
 - 9** pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Satuan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 10** pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11** pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Satuan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 12** penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Satuan;
 - 13** pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Satuan sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
 - 14** pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Satuan;
 - 15** pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
 - 16** penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah di Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
 - 17** pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - 18** pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan

- 19 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser adalah:

- 1 Pelayanan Publik (Call Center 112)
- 2 Penyediaan Layanan Dampak Dalam Rangka Penegakan Perda & Perkada (SPM TRANTIBUMLINMAS)

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

“RASIO KASUS PELANGGARAN TRANTIBUM”

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser s/d Triwulan II Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser	Indeks Rasa Aman	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Rasio kasus pelanggaran trantibum	13,16	12,90	12,64	12,38	12,14	18,87	50,64

umum masyarakat								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan “Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser “memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Rasa Aman”, mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100 dari target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- b) Sasaran “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat”, mencapai target, dimana Rasio realisasinya sebesar 18,87 dari target sebesar 12,64 dengan capaian kinerja sebesar 50,64%

Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan telah mencapai 55 % dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Periode Juni 2025 :

1. Kerjasama Antar Bidang dalam Penyusunan Rencana Kerja Masing-masing
2. Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder baik
3. Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
4. Adanya penyelenggaraan Bimtek Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP;

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan

perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser/tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan: Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Umum	Indeks Rasa Aman	Nilai Indeks Rasa Aman (IRA) Keterangan 0<=IRA<=20 Rasa Aman Sangat Rendah 20<IRA<=40 Rasa Aman Rendah 40<IRA<=60 Rasa Aman Sedang 60<IRA<=80 Rasa Aman Tinggi 80<IRA<=100 Rasa Aman Sangat Tinggi	100	100
Sasaran: Meningkatnya Ketentraman & ketertiban Umum masyarakat Kabupaten Paser	Rasio Kasus Pelanggaran Trantibum	Jumlah Kasus Setahun x 100.000 Jumlah Penduduk	12,38	13,60

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan

dan sasaran pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu “PENINGKATAN DAYA SAING SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK KABUPATEN PASER YANG SEJAHTERA” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan

9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-5 (Lima), yaitu “Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satpol PP	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT	100	28.061.333.823,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satpol PP	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT	90	-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	264.319.960,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	303.584.996,-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	82.033.980,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	121.674.996,-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	85.700.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	181.910.000,-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	19.170.855.552,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	380	19.239.147.552,-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	19.053.044.977,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	83.031.029,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18	186.102.575,-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	89 Persen	38.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	365	63.366.350,-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	10 Orang	23.800.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	15	42.200.000,-	

			Perundang-Undangan					Peraturan			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	2.494.904,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	21.166.350,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	89 Persen	7.044.803.600,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	29,67	8.953.210.211,-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3.292.842.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22	3.622.097.739,-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	12,779,124.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	4,472,585,942.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	4.670.816.372,-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,050,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	251,025,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	625.995.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	TERPENUHINYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	48 Laporan	197.618.617,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	TERPENUHINYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	48	197.618.617,-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	196.618.617,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Satpol PP	PERSENTASE TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH (BMD)	95 Laporan	381.498.300,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	PERSENTASE TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH (BMD)	265	511.219.501,-	

	Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	477.127.360,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP			511.219.501,-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	14.700.090,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP			0	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP	Persentase penurunan pelanggaran perda	100 Persen	6.254.617.946,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100%	15.680.973.400,-	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100%	4.794.755.000,-	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100%	6.995.431.600,-	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	30 Laporan	148.490.301,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100	746.732.000,-	
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	60 laporan	170.000.000,00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	688.390.301,-	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28 Dokumen	56.004.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25	90.504.000,-	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan	125 Dokumen	637.615.500,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	Satpol PP	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah	100	1.935.682.939,-	

	rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Ketentraman dan Ketertiban Umum		dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/ Kota			
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan SatuanPerlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yangBernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	810 Orang	1.419.449.500,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1680	2.191.313.360,-	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24 Dokumen	127.000.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	50	500.000.000,-	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	13 Unit	99.840.417,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	13	148.840.417	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2 Dokumen	4.000.000,-	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2	0	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	77 Laporan	491.333.551,00	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2	242.818.000,-	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	TERLAKSANANYA SOSIALISASI PERDA DAN CAKUPAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	100%	3.164.320.000,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	TERLAKSANANYA SOSIALISASI PERDA DAN CAKUPAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	100%	3.665.278.810,-	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8 Laporan	27.009.753,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	27.001.886,-	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah danPeraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	26 Laporan	2.849.038.924,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap	30	3.245.198.924,-	

								Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	44 Laporan	158.508.000,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	55	393.078.000,-	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota	Satpol PP	Rasio Jumlah PPNS Terhadap Kasus Yang Ditangani	1 Orang	90.000.000,-	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Satpol PP	Rasio Jumlah PPNS Terhadap Kasus Yang Ditangani	0,42	147.117.000,-	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	66.328.000,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	15	147.117.000,-	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD
Tahun 2025

Tabel 3. 3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Paser th 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							28.659.750.331,00	35.146.171.029,00	34.315.951.769,00	5.656.201.438,00							21.042.309.429,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							28.659.750.331,00	35.146.171.029,00	34.315.951.769,00	5.656.201.438,00							21.042.309.429,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							28.659.750.331,00	35.146.171.029,00	34.315.951.769,00	5.656.201.438,00							21.042.309.429,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan Layanan Kesekretariatan				-	100 Persen	20.660.675.331,00	27.097.096.029,00	28.061.333.823,00	-6.862.585.902,00							13.798.089.429,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	100 Persen	364.319.960,50	264.319.960,00	167.733.980,00	-196.585.980,50			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	ASN Satpol PP		157.056.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	192.919.960,50	92.919.960,00	82.033.980,00	-110.885.980,50	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			65.656.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	171.400.000,00	171.400.000,00	85.700.000,00	-85.700.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			91.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	95 Persen	19.494.824.513,50	19.170.855.552,00	19.136.076.006,00	-358.748.507,50			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	ASN Satpol PP		12.966.103.255,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	19.327.013.938,50	19.053.044.977,00	19.053.044.977,00	-273.968.961,50	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			12.884.675.959,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	167.810.575,00	117.810.575,00	83.031.029,00	-84.779.546,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			81.427.296,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	89 Persen	38.000.000,00	38.000.000,00	26.294.904,00	-11.705.096,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	ASN Satpol PP		56.827.577,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	33.000.000,00	33.000.000,00	23.800.000,00	-9.200.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			28.774.827,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	2.494.904,00	-2.505.096,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			28.052.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	NON URUSAN							28.659.750.331,00	35.146.171.029,00	34.315.951.769,00	5.656.201.438,00							21.042.309.429,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							28.659.750.331,00	35.146.171.029,00	34.315.951.769,00	5.656.201.438,00							21.042.309.429,00		
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	89 Persen	418.204.440,00	7.044.803.600,00	8.041.782.866,00	7.623.578.426,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	ASN Satpol PP		278.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	21.633.900,00	0,00	0,00	-21.633.900,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							28.659.750.331,00	35.146.171.029,00	34.315.951.769,00	5.656.201.438,00							21.042.309.429,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							28.659.750.331,00	35.146.171.029,00	34.315.951.769,00	5.656.201.438,00							21.042.309.429,00		
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	7 Paket	0,00	3.192.523.300,00	3.292.842.800,00	3.292.842.800,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			62.194.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12.801.100,00	12.801.100,00	12.779.124,00	-21.976,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			6.801.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				42 Paket	48 Paket	60.219.440,00	3.415.929.200,00	4.472.585.942,00	4.412.366.502,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			54.004.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			6.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	5.050.000,00	-1.450.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	24 Laporan	302.050.000,00	402.050.000,00	251.025.000,00	-51.025.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			147.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD				-	48 Laporan	197.618.617,00	197.618.617,00	197.618.617,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	ASN Satpol PP		198.454.797,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			1.836.180,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	196.618.617,00	196.618.617,00	196.618.617,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			196.618.617,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD				-	95 Laporan	147.707.800,00	381.498.300,00	491.827.450,00	344.119.650,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	ASN Satpol PP		140.947.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	13 Unit	132.707.800,00	366.498.300,00	477.127.360,00	344.419.560,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			132.707.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	14.700.090,00	-299.910,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			8.240.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				-	100 Persen	7.999.075.000,00	8.049.075.000,00	6.254.617.946,00	-754.855.000,00							7.244.220.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota				-	100 Persen	4.744.755.000,00	4.794.755.000,00	3.153.733.269,00	-1.591.021.731,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat, Mitra Instansi Terkait ASN		4.303.380.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				20 Dokumen	28 Dokumen	66.000.000,00	66.000.000,00	56.004.000,00	-9.996.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 Dokumen	125 Dokumen	945.481.000,00	945.481.000,00	637.615.500,00	-307.865.500,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			3.902.380.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				806 Orang	810 Orang	2.638.899.000,00	2.638.899.000,00	1.419.449.500,00	-1.219.449.500,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				20 Dokumen	24 Dokumen	80.000.000,00	130.000.000,00	127.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			43.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				30 laporan	60 laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	170.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				25 Laporan	30 Laporan	92.000.000,00	92.000.000,00	148.490.301,00	56.490.301,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			62.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				15 Laporan	77 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	491.333.551,00	-208.666.449,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				13 Unit	13 Unit	118.375.000,00	118.375.000,00	99.840.417,00	-18.534.583,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota				-	100 Persen	3.164.320.000,00	3.164.320.000,00	3.034.556.677,00	-129.763.323,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat		2.918.620.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5 Laporan	8 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	27.009.753,00	2.009.753,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				40 Laporan	44 Laporan	263.000.000,00	263.000.000,00	158.508.000,00	-104.492.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			148.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				24 Laporan	26 Laporan	2.876.320.000,00	2.876.320.000,00	2.849.038.924,00	-27.281.076,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			2.745.120.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah PPNS Terhadap Kasus Yang Ditangani				-	1 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	66.328.000,00	-23.672.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN		22.220.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				10 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	66.328.000,00	-23.672.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			22.220.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			J U M L A H						28.659.750.331,00	35.146.171.029,00	34.315.951.769,00	1.754.212.427.619,00							21.042.309.429,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tanah Grogot, 29 April 2025
Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja

H. MUHAMMAD GUNTUR, S.Sos,MM
Pembina TK.I
NIP. 19670717 198602 1 001